



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 : 125 - 138

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v14i2.4884

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris dan Australia

Comparison of Public Administration in the United Kingdom and Australia

¹Fitrianindita Rahayu Putri; ²Allina Ramadhina; ³Syabrina Amanda Wiyono; ⁴Nabila Ar-Rafa Zemlya; ⁵Reggy Zulhamzah

^{1,2,3,4,5}Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ditharahayu67@gmail.com

(Diterima: 26-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 19-08-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbandingan administrasi publik antara Inggris dan Australia melalui metode kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan tinjauan mendalam terhadap berbagai referensi dari jurnal, buku dan artikel. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan sistem administrasi publik kedua negara, dengan fokus pada bentuk negara, pemerintahan, sistem politik, serta konteks sejarah dan budaya yang membentuk keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Inggris dan Australia memiliki kesamaan dalam struktur dasar sistem pemerintahan, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan dan pengelolaan administrasi publik di kedua negara tersebut. Di Inggris, sistem pemerintahan cenderung lebih terikat pada tradisi dan aturan-aturan yang mapan, yang dipengaruhi oleh warisan monarki dan sejarah panjang sistem parlementer. Sebaliknya, Australia menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal. Peran masyarakat sipil dan partisipasi publik juga lebih terstruktur dan diakomodasi dalam sistem pemerintahan Australia, sementara Inggris lebih mengandalkan proses informal dalam administrasi publiknya. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh latar belakang sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara dalam membentuk karakteristik administrasi publik mereka. Hasil ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana konteks nasional dapat mempengaruhi dinamika pemerintahan dan administrasi publik di negara-negara tersebut.

Kata kunci : Administrasi publik, Australia, Inggris, Perbandingan, Sistem Pemerintahan.

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan entitas yang di dalamnya terkandung sekumpulan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kepercayaan yang berbeda, yang memiliki kehidupan bersama di suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang serupa, terhubung, patuh pada perundangan-undangan, dan mengelola pemerintahannya secara independen.

Fitrianindita Rahayu Putri; Allina Ramadhina; Syabrina Amanda Wiyono; Nabila Ar-Rafa Zemlya; Reggy Zulhamzah (2024). Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia

Negara didirikan atas dasar konsensus bersama dengan tujuan mengatur keberlangsungan hidup anggotanya guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan mereka (Gabriel, 2020). Untuk mencapai tujuan tertentu, individu atau sekelompok orang bekerja sama. Ada kemungkinan bahwa progres dan regresinya suatu negara tidak ditunjukkan oleh konstruksi fisik seperti bangunan bertingkat, institusi kesehatan, dan bangunan pemerintah yang bergengsi, tetapi oleh administrasinya (Canaldhy et al., 2023). Negara tidak runtuh atau terpengaruh oleh malapetaka alam, seperti gempa bumi, letusan gunung, banjir bandang, atau bencana alam lainnya. Sebaliknya, negara runtuh akibat buruknya manajemen yang dilakukan oleh mereka yang menjabat sebagai pemimpin (Marliani, 2018). Di sini, peran negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan wilayah dan penduduk, tetapi juga mencakup manajemen sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

Dalam konteks reformasi administrasi publik, muncul paradigma baru yang dikenal sebagai *New Public Management* (NPM), sebuah model manajemen publik baru yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, diciptakan dalam konteks reformasi administrasi publik dengan tujuan membawa konsep manajemen sektor swasta ke sektor publik. Menurut paradigma ini, birokrasi publik tidak hanya bertanggung jawab pada berbagai persyaratan hukum tetapi juga pada nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan masyarakat umum (Widanti, 2022).

Administrasi publik di Inggris dan Australia memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan struktur organisasi. Australia memprioritaskan desentralisasi dan efektivitas layanan publik, sedangkan Inggris memiliki sejarah pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik, yang telah membantu membangun birokrasi yang relatif transparan dan bertanggung jawab. Meskipun keduanya dianggap sebagai negara kaya, keduanya memiliki tantangan yang berbeda. Sebagai contoh, birokrasi sering kali menghambat perubahan kebijakan di Inggris, sedangkan fleksibilitas kebijakan di Australia terkadang menyebabkan implementasi lokal yang tidak merata (Martin Rambe, 2022). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sistem administrasi publik Inggris dan Australia, serta mengevaluasi administrasi publik di Inggris dan Australia, dengan menekankan pada keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam buku *Administrasi dan Manajemen Umum*, Prajudi Atmosudirjo (1982:272) menyatakan bahwa "Administrasi publik melibatkan pengelolaan negara sebagai organisasi dengan fokus mencapai tujuan-tujuan kenegaraan". Definisi ini menunjukkan bahwa administrasi publik melibatkan interaksi antara beberapa individu atau lebih individu yang berurusan dengan masalah negara dalam suatu perjanjian untuk mencapai tujuan yang sama, yang diinginkan oleh suatu entitas negara (Herizal et al., 2020).

Akan ada berbagai perspektif karena cara-cara yang berbeda digunakan untuk mengelola administrasi negara. Semua perbandingan berasal dari perbedaan ini. Pada dasarnya, perbandingan dilakukan untuk mempelajari berbagai organisasi negara serta upaya yang dilakukan oleh masing-masing organisasi untuk mencapai tujuan negaranya. Perbandingan administrasi negara adalah sebuah metode ilmiah untuk menentukan seberapa penting atau berharga satu atau lebih elemen administratif suatu negara dengan membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya (Wati et al., 2023). Perbandingan

administrasi negara melibatkan membandingkan organisasi administrasi negara, kebijakan sosial, performa administratif, dan lingkungan budaya di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, perbandingan administrasi publik memberikan manfaat bagi kita untuk menyadari kesamaan dan perbedaan di dalam praktik yang berkaitan dengan administrasi, berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih efektif, dan memperluas pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang sedang berkembang. (Salasiah & Sudiyarti, 2024).

Inggris adalah suatu entitas negara kesatuan yang menggunakan sistem parlementer dan monarki konstitusional. London, ibu kota Inggris, merupakan pusat pemerintahannya. Inggris menjadi salah satu bagian dari Britania Raya, dengan negara lainnya, seperti Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Sebaliknya, Australia adalah negara berparlemen dan anggota persemakmuran Inggris. Negara ini memiliki luas kurang lebih 76.000.000 km², dengan ibu kota Canberra. Perdana menteri di negara ini bertanggung jawab atas negara ini. Negara ini juga merupakan bagian dari persemakmuran Pasifik dan diatur oleh monarki parlementer-demokratis federal.

Kebaharuan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai cara-cara di mana komponen sejarah dan budaya membentuk sistem administrasi publik di kedua negara dan bagaimana hal tersebut dapat memajukan pemahaman teoritis di bidang administrasi publik. Dengan membandingkan pendekatan antara Inggris dengan Australia. Australia sebagai negara yang lebih muda dan berpengalaman dengan model federalisme, menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Federalisme di Australia memungkinkan otonomi daerah yang lebih besar, yang pada gilirannya menciptakan variasi dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal konsistensi dan kesetaraan dalam layanan publik (Abdullah & Jaes, 2024). Sedangkan, Inggris sebagai negara dengan tradisi parlementer yang panjang dan sistem hukum *common law* yang kuat, memiliki pendekatan administrasi publik yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Sistem ini menekankan pada stabilitas, akuntabilitas, dan pengawasan ketat, yang tercermin dalam struktur birokrasi yang ada (Al-Fatih & Fadli, 2024), penelitian ini juga menawarkan sudut pandang yang baru. Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bagaimana setiap negara telah menciptakan sistem administrasi yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial dan sejarahnya, di samping menyoroti ide-ide mendasar yang dimiliki oleh keduanya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi melalui analisis data yang telah dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan artikel terkait administrasi publik di Inggris dan Australia.

Penelusuran data dilakukan secara mendalam dengan mengacu pada sumber-sumber yang kredibel dan terverifikasi. Teknik utama dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, di mana data dianalisis dengan metode reduksi data. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi (Sugiyono, 2017:241).

C. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Bentuk Negara Inggris dan Australia

Bentuk negara adalah batas antara pendekatan sosiologis dan yuridis dalam memahami negara. Pendekatan sosiologis melihat negara secara keseluruhan tanpa memperhatikan isinya, sedangkan pendekatan yuridis melihat negara dari segi isi dan strukturnya (Gabriel, 2020). Bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, yaitu negara kesatuan, federasi, dan konfederasi. Dalam negara kesatuan, kekuasaan utama berada di tangan pemerintah pusat yang memiliki kontrol dominan atas daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terbatas dan dapat diatur atau dihapuskan oleh pemerintah pusat. Sistem ini sering kali memiliki struktur pemerintahan yang lebih sederhana dan sentralistik (Gusman, 2019). Sebaliknya, federasi membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau wilayah. Negara bagian atau wilayah memiliki otonomi untuk mengatur urusan internal mereka, sementara pemerintah pusat menangani urusan yang lebih luas, seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sistem federasi memungkinkan adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga masing-masing wilayah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal (Huroiroh & Fauzi, 2022). Terakhir, konfederasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan utama berada di tangan negara-negara anggotanya. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dan berfungsi sebagai koordinator antara negara-negara anggota yang mempertahankan kedaulatan penuh atas urusan internalnya (Siregar, 2023). Bentuk konfederasi jarang digunakan karena seringkali menghasilkan struktur yang kurang stabil dan efektif.

Inggris adalah negara kesatuan monarki (*Unitary State*) yang memiliki sistem pemerintahan sentralistik. Terletak di Eropa Barat dan berbentuk kepulauan, Inggris berbatasan dengan Skotlandia di utara, Wales di barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, Laut Utara di timur, dan Selat Inggris di selatan yang memisahkan Inggris dari daratan Eropa. Selain itu, Inggris mencakup lebih dari 100 pulau kecil, termasuk Isles of Scilly dan Isle of Wight. Meskipun Inggris memiliki pemerintah daerah di Wales dan Skotlandia, kekuasaan pusat tetap memiliki kontrol dominan dan dapat mengubah atau mencabut kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem ini menunjukkan betapa sentralistiknya pemerintahan Inggris, di mana keputusan besar diambil oleh pemerintah pusat (Saragih, 2022).

Bentuk negara Australia adalah federal dan termasuk dalam Persemakmuran Inggris. Sebagai negara federal, Australia terdiri dari enam negara bagian (New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania) dan dua wilayah yang masing-masing pemerintahannya sendiri memiliki kewenangan tertentu. Dalam sistem federal ini, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian atau wilayah. Masing-masing negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur urusan internal mereka, sementara pemerintah federal menangani urusan yang melibatkan seluruh negara. Ini mencerminkan sistem desentralisasi kekuasaan yang memberi

fleksibilitas dalam pengelolaan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah (Maulida et al., 2023).

Bentuk Pemerintahan Inggris dan Australia

Secara umum, "pemerintahan" merujuk pada proses atau cara di mana pemerintah melaksanakan wewenangnya di berbagai sektor (seperti ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) untuk mengatur urusan negara demi kepentingan publik. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintahan mencakup seluruh tindakan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, pemerintahan hanya mencakup tindakan, fungsi, tugas, dan kewajiban spesifik yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. (Prawiranegara, 2021).

Istilah "Bentuk Pemerintahan" mengacu pada cara suatu negara menjalankan pemerintahannya. Bentuk pemerintahan terdiri dari kumpulan institusi politik yang digunakan untuk mengelola negara dan menerapkan kekuasaan terhadap berbagai macam politik yang ada saat ini (Gabriel, 2020).

Tujuan utama suatu negara dalam menerapkan sistem pemerintahannya adalah untuk memastikan keteraturan dan keamanan umum, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasa bahagia. Berikut beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengupayakan perlindungan HAM, kesetaraan, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Menghormati dan menjalankan konstitusi untuk memastikan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.
3. Memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat melalui penerapan hukum yang adil.
4. Menghindari kerugian bagi bangsa Indonesia dari berbagai sumber eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Membangun dan menjaga sistem moneter yang mendukung kelancaran perdagangan baik di dalam negeri maupun internasional.
6. Menjamin kelancaran pembangunan nasional, memperkuat sistem perpajakan, dan melakukan restrukturisasi APBN dengan bijak.
7. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengembangkan dan memelihara sistem moneter agar perdagangan domestik dan internasional dapat berlangsung dengan baik.
8. Mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain melalui kerjasama di berbagai sektor.

Pemerintahan konstitusional adalah keyakinan yang didasarkan pada kebebasan individu dan bagaimana penerapan negara terbatas dan seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu bagi warga negaranya. Karena kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh konstitusi, ciri khas demokrasi konstitusional adalah tidak memiliki campur tangan atas sikap kesewenang-wenangan warganya. (Suyana et al., 2022).

Suatu negara berhak membuat konstitusinya dan sistem pemerintahannya. Konstitusi telah dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai adat

istiadat yang ada. Konstitusi ini berasal dari kesepakatan masyarakat yang telah terbentuk dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Adat istiadat memiliki hukum yang disebut hukum adat. Pada masa lalu, ketika tidak ada undang-undang, kehidupan masyarakat diatur oleh adat istiadat, dan pelanggaran terhadap adat istiadat dihukum oleh hukum adat yang disepakati oleh masyarakat.

Inggris dan Australia, pemerintahan monarki konstitusional, Raja Charles III berfungsi sebagai representasi negara, dan perdana menteri berperan sebagai Kepala Pemerintahan dan anggota parlemen juga berfungsi sebagai orang yang mengurus pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa raja dan ratu tidak dapat bertindak sesuka hati saat menjalankan pemerintahan negara.

Sistem Pemerintahan Inggris dan Australia

Pemerintahan Inggris menggunakan model monarki konstitusional dan sistem parlementer (Syaputri et al., 2023). Model ini telah menjadi landasan bagi banyak negara lain di seluruh dunia. Monarki konstitusional Inggris juga memiliki nilai simbolis yang signifikan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas bangsa. Monarki, meskipun bersifat seremonial, monarki terus menjadi representasi identitas dan kebersamaan nasional, yang sering kali menjadi kekuatan pemersatu dalam menghadapi perbedaan sosial dan politik (Agustini, 2022). Selain berperan sebagai kepala negara, Raja atau Ratu juga terlibat dalam adat istiadat dan budaya yang mendarah daging dalam masyarakat Inggris. Selain itu, monarki sangat penting bagi operasi pemerintahan termasuk dimulainya sesi legislatif dan pemberian persetujuan kerajaan untuk undang-undang yang disahkan oleh parlemen (Maulida et al., 2023), namun persetujuan ini sebenarnya hanya formalitas.

Sementara itu, sistem parlementer pertama di dunia didirikan oleh monarki Inggris, yang disebut sebagai "ibu dari parlementer" atau ibu dari seluruh parlementer modern. Parlemen Inggris mengadopsi sistem dua badan legislatif, atau bicameral. Parlemen ini terbentuk oleh *House of Commons*, juga dikenal sebagai Dewan Rakyat, dan *House of Lords*, juga dikenal sebagai Dewan Bangsawan di Inggris Raya. Parlemen Inggris adalah pusat kedaulatan rakyat, yang memberikan aspirasi mereka melalui konstituen, perwakilan rakyat dari daerah pemilihan mereka. Perdana Menteri Inggris memimpin sistem pemerintahan negara itu, yang membentuk kabinet, yang terdiri dari 21 menteri dan perangkat lainnya yang membantu menjalankan pemerintahan. (Syauyid Alamsyah & Nurdin, 2023).

Dewan Rakyat, juga dikenal sebagai *House of Commons*, memiliki jumlah kursi sekitar kurang lebih 600 kursi dan berperan penting sebagai lokasi untuk menyuarakan keinginan masyarakat dan meluluskan peraturan-peraturan dengan kesepakatan bersama para kabinet dan parlemen dewan bawah. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas persetujuan masa jabatan parlemen dan pengenaan pajak terhadap rakyat. Dewan Bangsawan, juga dikenal sebagai *House of Lords*, memiliki jumlah kursi sekitar kurang lebih 800 kursi di parlemen dan terdiri dari para bangsawan dari seluruh monarki Inggris. Dewan ini berfungsi sebagai kubu oposisi terhadap pemerintah, yang terdiri dari Kepala Pemerintahan dan para menternya, dalam mengevaluasi kebijakan yang akan diimplementasikan (Gunadi & Amri, 2023).

Fitrianindita Rahayu Putri, Allina Ramadhina, Syabrina Amanda Wiyono, Nabila Ar-Rafa Zemlya, Reggy Zulhamzah (2024). Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia

Di sisi lain, dengan sejarah panjang demokrasi dan sistem pemerintahan parlementer, Australia menjadi negara federal sejak tahun 1901. Sistem politik Australia yang termasuk dalam tradisi politik barat, demokratis, juga parlementer. Terdapat tujuh pemerintahan, satu di tingkat federal dan enam di tingkat negara bagian, memiliki badan legislatif bicameral yang terpilih secara berkala oleh masyarakat. Negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur politik lokal mereka sebagai negara federal. Australia memiliki parlemen yang meliputi dua lembaga, yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat, juga dikenal sebagai *House of Representative* serta Senat. Kompetisi antar dua partai politik utama yang menentukan kehidupan politik di parlemen : Partai Buruh, juga dikenal sebagai *Labor Party* serta Partai Liberal-Negara, yang juga dikenal sebagai *Liberal-County Party* (Martin Rambe, 2022). Secara keseluruhan, sistem politik Australia merupakan bukti dedikasinya terhadap demokrasi dan pemerintahan perwakilan. Dengan sistem federal, Australia berhasil menyeimbangkan antara otoritas federal dan kedaulatan negara bagian sambil mempertahankan lanskap politik yang hidup yang ditandai dengan perselisihan di antara partai-partai politik utama. Sejak Australia menjadi negara federasi, pengaturan ini telah mendukung stabilitas politik dan kemajuan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang menyatukan kedua partai ini adalah struktur organisasinya yang bersifat federal. Timbul dari mogok massal yang tidak berhasil pada dekade pertama tahun 1890-an, Partai Buruh menjadi partai yang paling berumur di Australia. Meskipun demikian, Partai Liberal-Negara bermula pada kelompok borjuis di parlemen pada akhir 1800-an sebagai tanggapan terhadap munculnya Partai Buruh (Maulida et al., 2023). Sistem pemerintahan Australia memiliki sifat yang hidup dan dinamis di tengah persaingan antara dua partai politik utamanya, yang menunjukkan dedikasi negara ini terhadap demokrasi dan pemerintahan perwakilan. Kedua partai politik terkemuka ini, dengan gaya pemerintahan yang berbeda namun sama kuatnya, merupakan bukti komitmen Australia terhadap sistem pemerintahan yang inklusif dan transparan. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan publik melalui prosedur demokrasi yang adil dan terbuka. Baik Partai Buruh maupun Partai Liberal mendukung stabilitas politik dan kemajuan demokrasi di Australia, terlepas dari berbagai perbedaan yang ada. Sebagai salah satu sistem politik yang paling dinamis dan berfungsi dengan baik di dunia, struktur federal Australia memastikan distribusi kekuasaan dan perwakilan yang adil di seluruh wilayah negara.

Sistem Politik Inggris dan Australia

a. Sistem Politik Inggris

Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah sebuah mekanisme yang membentuk pola konsisten di antara individu, melibatkan makna dari aturan, kekuasaan, dan kewenangan. Sementara itu, Sukarna mendefinisikan sistem politik sebagai suatu struktur yang mengatur dan mengelola kekuasaan dalam sebuah negara serta memelihara posisi kekuasaan tersebut. Selain itu, sistem politik juga berfungsi dalam mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta hubungan antara negara dan pemerintah asing (Sapri et al., 2022).

Banyak partai politik ada di sistem politik kerajaan Inggris. Struktur politik Inggris mengacu pada lembaga negara yang berfungsi dan beroperasi di negara tersebut. Partai

Buruh dan Partai Konservatif menjadi dua partai politik utama di Inggris sejak tahun 1920-an (Nurdin, 2023). Partai Liberal dan Partai Konservatif juga merupakan partai politik utama sebelum munculnya Partai Buruh.

Partai Liberal, bersama dengan Partai Konservatif, adalah salah satu partai politik utama di Inggris sebelum munculnya Partai Buruh. Meskipun kadang-kadang terbentuk koalisi atau pemerintahan minoritas, sistem pemilihan "first-past-the-post" di Inggris lebih cenderung menguntungkan dua partai dominan ini. Namun, pemerintahan sebelumnya pernah memanfaatkan dukungan dari partai ketiga, seperti Partai Liberal Demokrat, untuk mendapatkan mayoritas di Parlemen. Koalisi antara Partai Konservatif dan Liberal Demokrat berlangsung dari tahun 2010 hingga 2015, menjadi koalisi pertama sejak 1945. Koalisi ini berakhir setelah pemilihan parlemen pada 7 Mei 2015, di mana Partai Konservatif meraih 330 kursi di House of Commons, sementara partai-partai koalisi lainnya kehilangan kursi mereka (Thufail, 2020).

Suprastruktur politik Inggris terdiri dari berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi serta menjalankan beragam aktivitas pemerintahan. Tiga bagian yang membentuk suprastruktur politik Inggris meliputi:

1. Kekuasaan legislatif: dipegang oleh parlemen Inggris, yang terdiri dari dua majelis: *House of Lords* (Majelis Tinggi) dan *House of Commons* (Majelis Rendah).
2. Kekuasaan eksekutif: dipegang oleh raja atau ratu, yang berfungsi sebagai kepala negara. Raja Charles III, yang menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth II, sekarang adalah perdana menteri Inggris dengan dua puluh menteri kabinet.
3. Kekuasaan yudikatif: Kekuasaan yudikatif tidak disebutkan dalam konstitusi Inggris, sehingga tidak penting. Dalam kasus ini, hukum tidak membatasi pemerintah; sebaliknya, masyarakat percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik yang ada di negara tersebut adalah kekuatan politik yang tidak terlihat, tetapi keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan politik di negara tersebut. Salah satu partai politik terbesar di Inggris adalah sebagai berikut (Juniar, 2021):

1. Partai konservatif, yang mewakili mayoritas anggota parlemen;
2. Partai buruh, yang bertindak sebagai oposisi utama;
3. Partai liberal dan partai sosial demokrat.

b. Sistem Politik Australia

Sistem politik Australia dianggap barat, demokratis, dan parlementer. Kecuali satu, tujuh pemerintahannya, pemerintah federal dan enam negara bagian memiliki parlemen bikameral yang dipilih secara berkala oleh rakyat. Kebebasan beragama, berkumpul, dan berbicara adalah prinsip utama demokrasi liberal yang mendasari pemerintahan Australia. Meskipun mirip dengan pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat, Australia memiliki keunikan tersendiri. Saat enam bekas koloni Inggris, yang kini menjadi negara bagian Australia, sepakat untuk bersatu, Persemakmuran Australia dibentuk pada Hari Federasi, 1 Januari 1901. Konstitusi Australia, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1901, menjadi fondasi bagi pemerintahan Australia saat ini. Struktur politik saat ini Australia terdiri dari (Maulida et al., 2023):

1. Kekuasaan legislatif diisi oleh parlemen tingkat pusat yang bersifat bikameral,

yaitu Senat, yang merupakan Majelis Tinggi, dan *House of Representatives*, yang terdiri dari Majelis Rendah atau DPR. Majelis Rendah dan Majelis Tinggi bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan Undang-Undang di seluruh negeri. Majelis Tinggi yang terdiri dari 148 anggota, memiliki peran penting dalam meninjau dan memberikan saran terhadap sebagian besar rancangan Undang-Undang.

2. Kekuasaan eksekutif diisi oleh para Gubernur Jenderal dan Raja Inggris yang berkuasa. Raja dan Ratu Inggris tidak terlibat secara langsung dalam sistem politik Australia, tetapi hanya berperan sebagai simbol. Raja atau Ratu diwakili secara resmi oleh Gubernur Jenderal, yang tidak memiliki peran dalam tugas-tugas harian pemerintahan. Gubernur Jenderal dipilih langsung oleh rakyat atas rekomendasi Perdana Menteri, sementara Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
3. Kekuasaan yudikatif, yang diwakili oleh pengadilan tinggi, mahkamah agung, pengadilan negara tingkat rendah, dan lembaga hukum lainnya.

Tiga partai besar mendominasi perpolitikan Australia, menurut infrastruktur politiknya (Maulida et al., 2023):

1. Partai Nasional mewakili kelompok petani atau pemilik lahan.
2. Partai Liberal didukung oleh kelas menengah dan atas.
3. Partai Buruh mewakili kelompok pekerja atau buruh.

3 Faktor Dominan Yang Membentuk Perbedaannya

a. Faktor Sejarah

Inggris memiliki sejarah penjajahan yang lebih tua, dengan pendirian pemukiman Eropa pertama di Australia pada 26 Januari 1788. Australia didirikan sebagai koloni Inggris, dengan tujuan awal untuk membina penduduk asli dan juga para tawanan. Penjajahan ini membuka pintu bagi penduduk asli dan pendatang lainnya untuk datang dan menetap di Australia.

Sejarah Inggris dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting yang membentuk negara tersebut seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa faktor sejarah utama meliputi pendudukan Romawi pada abad pertama Masehi, yang berdampak pada perkembangan administrasi, bahasa, dan budaya, termasuk pendirian kota-kota seperti Londinium (sekarang London). Pada tahun 1066, William Sang Penakluk dari Normandia menaklukkan Inggris, membawa pengaruh budaya dan bahasa Norman yang signifikan. Pada tahun 1215, Raja John dipaksa menandatangani Magna Carta, yang menjadi fondasi hukum dan hak-hak individu serta memengaruhi perkembangan konstitusi di masa depan. Konflik antara Inggris dan Prancis yang berlangsung dari 1337 hingga 1453, dikenal sebagai Perang Seratus Tahun, memperkuat identitas nasional Inggris. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan yang dimulai oleh Raja Henry VIII dan dilanjutkan oleh Ratu Elizabeth I, memisahkan Gereja Inggris dari Gereja Katolik Roma dan membawa perubahan dalam agama negara. Abad ke-18 menyaksikan Revolusi Industri di Inggris, yang memicu perubahan besar dalam masyarakat dan ekonomi dengan urbanisasi dan perkembangan industri. Pada abad ke-19, Inggris membangun Kekaisaran Britania Raya yang luas, mempengaruhi politik, ekonomi, dan budaya global. Setelah terlibat dalam dua Perang

Dunia, Inggris mengalami perubahan besar dan memulai proses dekolonisasi setelah Perang Dunia II, yang mengubah peran Inggris di panggung dunia dengan banyak koloni yang meraih kemerdekaan (Mutiarawati Fajariah, 2020).

Australia memilih untuk tetap sebagai bagian dari Persemakmuran Inggris melalui referendum. Walaupun memiliki kemerdekaan konstitusional, Australia masih memiliki monarki konstitusional dengan Raja yang diwakili oleh Gubernur Jenderal dan Gubernur negara bagian. Kekuasaan eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi dijalankan oleh Gubernur Jenderal dengan nasihat Menteri-menteri.

Inggris memiliki monarki konstitusional dengan sejarah panjang perkembangan sistem parlementer yang berawal dari Magna Carta pada tahun 1215. Sistem pemerintahan Inggris menjadi model bagi banyak negara lain. Inggris tidak mengalami kolonialisasi, melainkan merupakan pusat dari Kekaisaran Inggris yang mengkolonialisasi banyak wilayah di seluruh dunia (Putri & Pahlevi, 2023).

b. Faktor Konstitusional

Australia memiliki konstitusi yang lebih kompleks dan lebih berbeda dengan Inggris. Konstitusi Australia dibuat pada tahun 1900 dan telah beberapa kali diubah. Australia juga memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih independen dari Inggris.

Raja Inggris juga menjadi Kepala Negara Australia, tetapi tidak terlibat langsung dalam menjalankan urusan keseharian Australia. Raja hanya berfungsi sebagai simbol dan diwakili oleh Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia.

Inggris memiliki sistem pemerintahan Westminster dengan pemisahan kekuasaan yang lebih kabur antara eksekutif dan legislatif. Perdana Menteri dan kabinet berasal dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Meskipun Australia mengikuti model Westminster, Australia memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ini diatur secara eksplisit dalam konstitusi tertulis (Utari, 2017).

c. Faktor Sosial Budaya

Bahasa Inggris di Inggris memiliki aksen yang berbeda dengan bahasa Inggris Australia. Bahasa Inggris Australia dipengaruhi oleh imigrasi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang membawa kata-kata dan istilah baru ke dalam bahasa Inggris Australia. Budaya Inggris memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya Australia, namun dengan sentuhan unik dari warisan Aborigin dan pengaruh Amerika. Budaya Australia berevolusi dari pengalaman kolonial dan imigrasi, dengan legenda "*Aussie battler*" yang mencerminkan perjuangan melawan alam dan pemerintah.

Inggris adalah negara yang multikultural dengan komunitas imigran besar dari bekas koloni seperti India, Pakistan, Karibia, dan Afrika. Ini menciptakan masyarakat yang beragam dengan berbagai tradisi dan festival budaya. Sedangkan Australia memiliki populasi imigran yang besar, dengan migrasi signifikan dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Australia merayakan multikulturalisme dengan berbagai festival dan kebijakan yang mendukung keragaman budaya (Erlina, 2019).

Australia lebih beragam secara budaya daripada Inggris. Multikulturalisme dan keragaman latar belakang, budaya, dan komunitas di Australia memengaruhi segala hal, mulai dari makanan yang dikonsumsi hingga perayaan yang dirayakan bersama (Soemantri,

2019). Suku Aborigin telah memainkan peran penting dalam membentuk budaya hidup tradisional Australia. Bahasa, filosofi, dan sejarah mereka yang beragam membentuk budaya tertua yang masih hidup di dunia, yang telah berlangsung selama satu milenium. Inggris memiliki gaya berpakaian yang sering kali formal, terutama dalam konteks profesional dan sosial, sedangkan Australia cenderung memiliki gaya hidup dan pakaian yang lebih santai, yang dipengaruhi oleh iklim yang lebih hangat dan gaya hidup di luar ruangan.

Setelah Perang Dunia II, Australia mencari perlindungan keamanan dari Amerika Serikat karena tidak memiliki perlindungan dari Inggris. Hal ini memicu perubahan dalam perencanaan strategis dan pertahanan Australia, serta memperkuat pengaruh Amerika di Australia dalam hal budaya dan bahasa.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan administrasi publik antara Inggris dan Australia memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kedua negara mengelola pemerintahan mereka. Inggris, sebagai negara kesatuan dengan sistem monarki konstitusional menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki otoritas dominan atas daerah-daerahnya. Pemerintah pusat Inggris memiliki kewenangan untuk memodifikasi atau menarik kembali kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, mencerminkan karakteristik sistem pemerintahan yang sentralistik, di mana keputusan banyak dipengaruhi oleh pemerintahan pusat. Menurut Saragih (2022), sentralisasi ini memberi pemerintah pusat kendali yang lebih kuat atas pelaksanaan kebijakan, dan dapat membuat daerah kurang fleksibel dalam menangani masalah-masalah lokal.

Sebaliknya, Australia sebagai negara federal yang juga termasuk dalam Persemakmuran Inggris, menunjukkan pembagian kekuasaan yang lebih merata antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sistem federal ini memungkinkan distribusi kekuasaan, sehingga masing-masing negara bagian memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengatur urusan internal mereka. Rosika, dkk (2023) mengemukakan bahwa sistem desentralisasi seperti ini memungkinkan inovasi kebijakan di tingkat negara bagian yang kemudian dapat menjadi contoh bagi pemerintah pusat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kedua negara memiliki sistem monarki konstitusional, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan sehari-hari. Di Inggris, raja berperan sebagai kepala negara simbolis, sementara perdana menteri menjalankan pemerintahan. Di Australia, meskipun raja juga merupakan kepala negara, peran ini diwakili oleh Gubernur Jenderal yang menjalankan tugas eksekutif atas nama raja (Martin Rambe, 2022). Peran simbolis monarki dalam kedua negara ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk pemerintahan serupa, mekanisme eksekutif yang dijalankan berbeda sesuai dengan konteks nasional masing-masing.

Dari segi sistem politik, Inggris menggunakan model monarki konstitusional dan sistem parlementer dengan parlemen dua kamar yang terdiri dari *House of Commons* dan *House of Lords*. Sementara Australia memiliki parlemen bikameral yang terdiri dari *House of Representatives* dan Senat, dengan sistem politik yang sangat dipengaruhi oleh dua partai utama. Dua partai tersebut yaitu Partai Buruh dan Partai Liberal. Keberadaan dua partai besar ini menciptakan stabilitas politik di Australia, namun juga dapat membatasi spektrum kebijakan yang diusulkan dan diimplementasikan.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perbedaan dalam struktur administrasi dan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Meskipun Inggris dan Australia memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan, keduanya tetap berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis dan efektif demi kesejahteraan rakyat mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan kebijakan, baik sentralisasi maupun desentralisasi, keduanya memerlukan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik untuk mencapai hasil yang optimal.

D. KESIMPULAN

Inggris dan Australia memiliki pendekatan administrasi publik yang berbeda karena bentuk negara dan sistem pemerintahan mereka. Inggris dengan sistem negara kesatuan dan monarki konstitusional dan cenderung sentralistik, di mana pemerintah pusat memiliki dominasi yang signifikan atas daerah-daerah. Sebaliknya, Australia sebagai negara federal dalam Persemakmuran Inggris menunjukkan desentralisasi kekuasaan yang membagi otoritas antara pemerintah pusat dan negara bagian. Meskipun kedua negara memiliki banyak prinsip dasar yang sama dalam administrasi publik, Inggris lebih menekankan tradisi dan kesinambungan. Sementara Australia lebih inovatif dan adaptif, khususnya dalam konteks federalisme. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana struktur negara dan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi praktik administrasi publik, serta menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan politik dalam analisis administrasi publik di berbagai negara. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik administrasi publik di dunia yang sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., & Jaes, L. (2024). *Fleksibiliti Federalisme dalam Monarki Dunia : Perbandingan Empat Negara*. 4(1), 57-68.
- Agustini, D. (2022). Politics of Virtue John Milbank dan Adrian Pabst: Monarki dan Aristokrasi sebagai Solusi atas Krisis dalam Teori Politik Liberal. *Researchgate*.
- Al-Fatih, S., & Fadli, M. (2024). History of The Development of The Principle of Delegatus Non-Potes Delegare and Its Implementation. *Arena Hukum*, 17(1), 210-225.
- Canaldhy, R. S., Suandi, S., & Purwanti, U. (2023). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494>
- Erlina, M. (2019). Sejarah dan perkembangan multikulturalisme hingga penghapusan white Australia policy. *Zait Geist: Jiwa Zaman*, 2(1).
- Gabriel, E. (2020). Pengertian dan bentuk-bentuk negara. *Preprints*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/wzx3d>
- Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 41-49. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>
- Gusman, E. (2019). Perkembangan teori konstitusi untuk mendukung negara kesatuan republik Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Fitriandita Rahayu Putri, Allina Ramadhina, Syabrina Amanda Wiyono, Nabila Ar-Rafa Zemlya, Reggy Zulhamzah (2024). *Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia*

- Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Huroiroh, E., & Fauzi, M. (2022). Konsep Negara Federasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 18–41.
- Juniar, A. (2021). Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.4796>
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*.
- Martin Rambe. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.1546>
- Maulida, A. S., Sepkamala, D. D., Herayani, S., & Ikrima, W. H. (2023). Analisis perbandingan administrasi publik negara Inggris dan Australia. *PENTAHELIX*, 1. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.163-174>
- Mutiawati Fajariah, D. S. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760–1830. *HISTORIA*, 8(1).
- Nuridin, N. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6192>
- Prawiranegara, K. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. *Lex Renaissance*, 6(3), 591–604.
- Putri, Z., & Pahlevi, M. R. (2023). Masuknya Inggris ke Australia dan dampaknya bagi suku Aborigin. *Danadyaksa Historica*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5664>
- Rosika, C., Frinaldi S, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1111>
- Salasiah, & Sudyarti. (2024). *Perbandingan Administrasi Publik* (A. N. S. Putro (ed.)). Tahta Media Group.
- Saprii, R. B. S., Pratama, Y. D., & Aponno, A. D. (2022). Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi dan Demokrasi. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 186–207.
- Saragih, G. M. (2022). Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek (comparison of Indonesian and England constitutions from various aspects). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>
- Siregar, R. C. V. (2023). Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(2), 87–97.
- Soemantri, N. P. (2019). Adaptasi budaya mahasiswa asal Indonesia di Australia. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.727>
- Suyana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., Maulani, M. I., Nurdiansyah, P., Pratama, M. R., Akmal, M. A., & Ibrahim, M. A. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki* (A. I. Setiawan (ed.)). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. [https://etheses.uinsgd.ac.id/55038/1/SISTEM POLITIK INDONESIA.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/55038/1/SISTEM%20POLITIK%20INDONESIA.pdf)
- Syaputri, O. M., Nurfiqra, T., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlemerter. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Syauyiid Alamsyah, & Nuridin. (2023). Lembaga representatif publik: relasi kekuasaan dalam perspektif perbandingan sistem presidensial vs sistem parlementer studi kasus Indonesia dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>
- Thufail, A. (2020). Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal. *Journal of Integrative International Relations*, 5(1), 33–45.
- Fitrianindita Rahayu Putri; Allina Ramadhina; Syabrina Amanda Wiyono; Nabila Ar-Rafa Zemlya; Reggy Zulhamzah (2024). *Perbandingan Administrasi Publik Negara Inggris Dan Australia*

- Utari, D. R. (2017). Kolonisasi bangsa Inggris di Australia dan akibatnya bagi kelangsungan hidup Suku Aborigin. In *Skripsi*.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80942>.
- Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023). Analisis perbandingan administrasi publik negara China dan Rusia. *PENTAHHELIX*. <https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*.
<https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>